

## ABSTRAK

### **Pengaruh Gaya Kepemimpinan Lurah dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan**

**Oleh: Farras Maulana Sambas**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan lurah dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2. Jenis penelitian ini adalah *kausatif*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak daerah atau masyarakat di setiap kecamatan di kota Padang yang berjumlah 201.759 masyarakat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 sampel yang dipilih dengan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gaya kepemimpinan lurah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan koefisien  $\beta$  sebesar 0.257, nilai thitung sebesar 1.99125 dan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . (2) Sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 yang ditunjukkan dengan koefisien  $\beta$  sebesar 0,109 nilai thitung sebesar 1,316 dan nilai signifikansi  $0.196 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) peneliti menyarankan bahwa agar lurah beserta aparaturnya lebih aktif lagi dalam mengajak masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya. Dan lurah beserta aparaturnya agar lebih memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membayar PBB P-2 nya, agar penerimaan pajak dari sektor PBB-P2 lebih maksimal lagi. (2) Peneliti menyarankan bahwa agar pemerintah kota padang lebih mengoptimalkan lagi dalam penerapan sanksi administrasi agar kepatuhan wajib pajak lebih meningkat lagi. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB P-2 seperti penegakan hukum perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan perpajakan.